

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asiah, Nur. 2017. Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*: Vol 15 No 1.
- Aswari, Aan, Andika Prawira Buana, dan Farah Syah Rezah. 2018. Harmonisasi Hukum Hak Untuk dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa di Makassar. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*: Vol 20 No 1.
- Azmar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Oktober 2016*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada 18 Juni 2022 pukul 20.50 WIB.
- Chandra, M. Jeffri Arlinandes, et. al. 2022. Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*: Vol 19 No 1
- Christianto, Hwian. 2020. Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Mimbar Hukum*: Vol 32 No 2.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2016. *Risalah Rapat Komisi I DPR RI*.
- Djafar, Wahyudi, Ruben Sumigar dan Lintang Setianti. 2016. *Perlindungan Data Pribadi: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: ELSAM.
- Djafar, Wahyudi, et. all. 2018. *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia Orisinalitas dan Tantangan dalam Penerapannya*. Jakarta Selatan: Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers).
- Djazuli, H. A. 2003. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hall, Matthew and Jeff Hearn. 2017. *Revenge Pornography Gender, Sexualities and Motivations*. Taylor & Francis.

- Hamidi, Jazim. 2011. *Hermeneutika Hukum Sejarah – Filsafat & Metode Tafsir*. Malang: Universitas Brawijaya Pers (UB Pers).
- Handoyo, Hestu Cipta. 2018. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Atma Jaya.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Mimin Dwi. *UU ITE, Hak Untuk Dilupakan, dan Hak Publik atas Informasi* diakses melalui website: <https://www.komnasham.go.id/index.php/opini/2016/12/08/2/uu-ite-hak-untuk-dilupakan-dan-hak-publik-atas-informasi.html> pada 22 Oktober 2022 pukul 11.25 WIB.
- Hidayat, Imam. 2018. *Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah*: Tesis. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- International Law Making. 2006. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Internasional*: Vol 4 No 1.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kholbi, Dimas Nur. 2019. *Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*: Tesis. Universitas Negeri Sunan Ampel.
- Komnas Perempuan. 2021. *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI).
- Duggan, Jo-Anne. *The Right to Memory*, (Research Initiative: Archive & Public Culture), diakses: [http://www.apc.uct.ac.za/apc/projects/archival\\_platform/right-memory](http://www.apc.uct.ac.za/apc/projects/archival_platform/right-memory) pada 26 Januari 2023 pukul 11.40 WIB.
- Lee, Philip. 2013. *Towards a right to Memory*. *Issuu*.

- Majelis Umum PBB. *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia* diakses melalui website: <https://www.komnasham.go.id/> pada 07 februari 2022 pukul 12.00 WIB.
- Manan, Bagir. 2011. Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum. *Dewan Pers*.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mu'allifin, M. Darin Arif. 2017. *Hukum Penataan Ruang: Sebagai Pengendali Pemanfaatan Ruang Kota dalam Konteks Pembangunan yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Lingkar Media.
- Narbukoi, Cholid & Abu Achmadi. 2008. *Metode Penelitian: Memberi Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta di Harapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-langkah yang Benar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noval, Sayid Mohammad Rifqi & Ahmad Jamaludin. 2020. Menimbang Kembali Kehadiran Hak Untuk Dilupakan: Penerapan dan Potensi Ancaman. *Jurnal Legislasi Indonesia*: Vol 17 No 3.
- Nur, Abdur Rahman. 2018. *Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*. Bogor: Guepedia.
- Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Pradono, Calvin. 2018. *Perbandingan Hak Untuk Dilupakan di Indonesia dan Uni Eropa*: Skripsi. Universitas Katolik Soegijapranata: Fakultas Hukum dan Komunikasi.
- Pratama, Bambang. 2016. Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta dan Hak Untuk Dilupakan (*right to be forgotten*). *Veritas et Justitia*: Vol 2.
- Prasetyo, Stanley Adi. 2016. Pers dan Media Online: Tantangan Baru dalam Pelaksanaan Kebebasan Pers Kebebasan Berekspresi di Indonesia. *Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*.
- Safitri, Ria. 2018. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi. *Salam: Jurnal Sosialisasi & Budaya Syar'i*: Vol 5 No 3.

- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Pesada.
- Surat Edaran OJK (SE-OJK) Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Dara dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.
- Tjahyana, Widodo Eka. 2008. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunannya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Dengan Penjelasan dan Amandemennya Beserta Susunan Kabiner Baru. Surabaya: Penerbit Anugerah.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wilujeng, Sri Rahayu. 2013. Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis. *Humanika*: Vol 18 No 2.